

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk menjadikan insan yang dapat yang lebih baik dari sebelumnya dan meningkatkan pemahaman tentang arti kehidupan bersosial. (Omeri, 2015) Sejak tahun 2013 pemerintah pusat telah mengeluarkan program wajib belajar selama sembilan tahun atau setara dengan pendidikan hingga sekolah menengah atas atau sederajat. Program tersebut merupakan salah satu upaya untuk dapat mempersiapkan generasi emas bangsa Indonesia di tahun 2045 mendatang. Hal ini harus diimbangi dengan pembangunan kualitas pendidikan yang merata di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

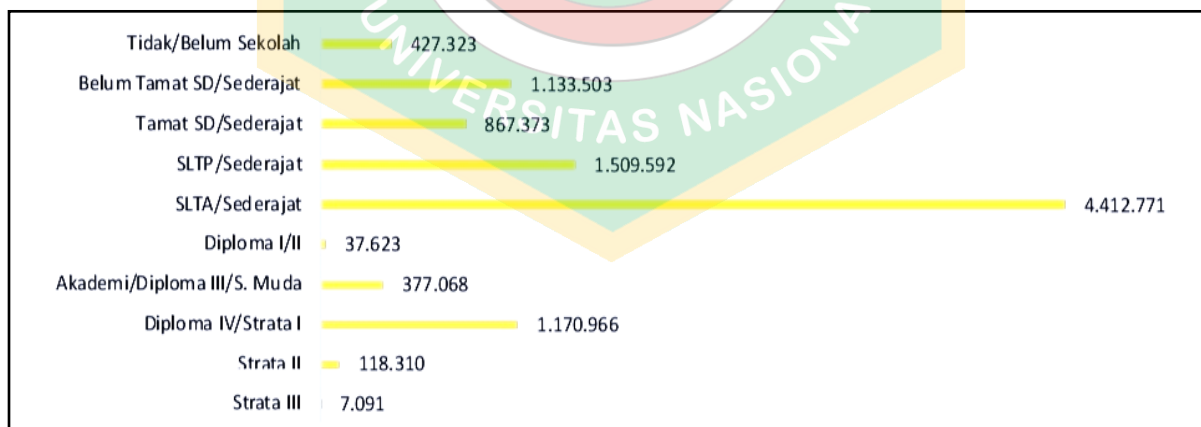
Pendidikan yang berkualitas juga diharapkan menjadi sarana proses transmisi ilmu pengetahuan, keagamaan, moral, keterampilan, serta berbagai aspek lainnya dari masa ke masa. Pendidikan yang berkualitas dapat dilihat dari tingkah laku dan prestasi peserta didik di masing-masing instansi pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Pendidikan tidak hanya berfokus pada kepentingan masing-masing individu atau pribadi saja, tetapi juga memiliki dimensi yang penting bagi masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUPS) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1990. Disamping itu menciptakan perkembangan kepribadian individu, pendidikan juga memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan dan memperbaiki masyarakat.(Azzuhri, 2009)

Peran pendidikan memerlukan kesejahteraan sosial, yang berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang menekankan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, salah satu langkah yang dapat diimplementasikan dengan melalui penyediaan akses pendidikan dasar yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan.(Fajar & Mulyanti, 2019) Saat ini pemerintah telah berupaya dalam

memberikan pelayanan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah untuk memastikan standar pendidikan yang memadai melalui bantuan alokasi daerah.

Pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Sistem inilah melibatkan banyak pihak dari berbagai komponen, baik yang bersifat mikro maupun makro dalam berbagai unit pendidikan. Karena setiap komponen memiliki peran yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyediakan sumber-sumber pembiayaan pendidikan, menetapkan sistem dan mekanisme alokasi dana, meminimalisir masalah terkait pembiayaan pendidikan.

Permasalahan perekonomian terkait pembiayaan masih menjadi persoalan bagi para individu dari berbagai jenjang, hal ini dikarenakan pembiayaan dari alokasi dana pemerintah yang belum merata, sehingga banyak peserta didik yang tidak melanjutkan pendidikannya dikarenakan keterbatasan ekonomi. Hal tersebut banyak ditemukan di berbagai lapisan daerah, hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan di pelosok sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah daerah untuk mengatasi hal tersebut. Sedangkan bagi masyarakat di ibukota Jakarta, juga masih yang belum mendapatkan hak nya untuk mendapat pendidikan karena ekonomi yang tidak memadai dari keluarganya.

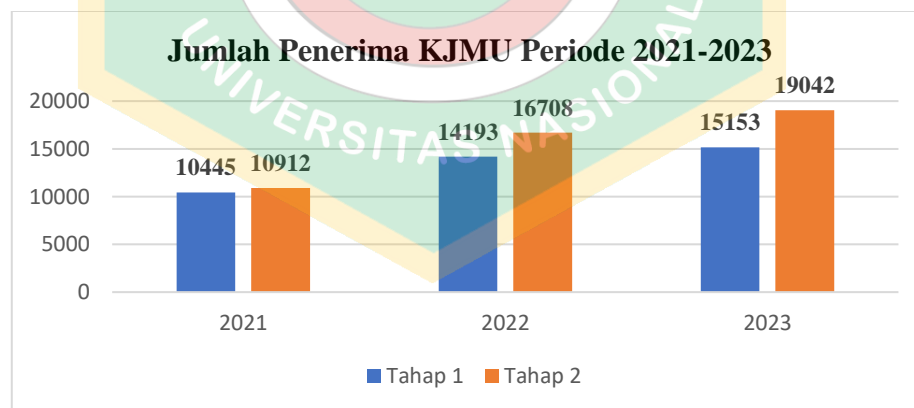


Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk DKI Jakarta Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2023

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Berdasarkan data diatas, kesadaran penduduk akan perguruan tinggi semakin meningkat, terlebih lagi di era saat ini, generasi z yang sudah mulai memasuki usia delapan belas keatas di hadapkan dengan pilihan antara bekerja atau kuliah, Sebagian ada yang memilih untuk melanjutkan berkuliah, sebagian ada yang memilih langsung bekerja, dan sebagian lagi ada yang bekerja sambil kuliah. Hal tersebut didasarkan oleh era yang sudah berkembang, dimana saat ini pendidikan tinggi dianggap telah menjadi tujuan utama generasi z karena pesatnya kemudahan informasi. Selain itu, semakin ketatnya persaingan dunia kerja saat ini mendorong generasi z untuk memiliki pengalaman dan *skills* yang tinggi untuk bersaing dalam dunia kerja.

Dalam dinamikanya, pemerintah memiliki program jaminan sosial dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk membantu para peserta didik yang berasal dari perekonomian yang kurang memadai agar mampu menunjang pendidikannya. Salah satunya program dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu bantuan dalam bentuk kartu dengan nama Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk mahasiswa dengan domisili DKI Jakarta. Program ini diperuntukkan untuk mahasiswa dengan KTP DKI Jakarta yang ingin menempuh Perguruan Tinggi. KJMU juga merupakan bantuan lanjutan dari KJP apabila siswa dari SMA/ sederajat ingin melanjutkan untuk berkuliah. (Hardiansyah & Tijan, 2023)



Gambar 1. 2 Jumlah penerima KJMU periode 2021-2023

Sumber: Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2021-2023 “telah diolah kembali”

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat perkembangan jumlah penerima KJMU dari tahun ketahun yang mengalami peningkatan, hingga tahun 2023 tercatat sebesar 15.153 mahasiswa dengan domisili DKI Jakarta yang mendapatkan manfaat bantuan KJMU dari 90 PTN di Indonesia dan 11 PTS di Jakarta. Peningkatan ini didasarkan oleh Peraturan Gubernur No.97 Tahun 2019 yang dalam Pergub sebelumnya KJMU hanya bisa didapatkan oleh mahasiswa dari PTN saja, diperluas dengan pernyataan PTS juga bisa mendapat bantuan KJMU dengan catatan kampus dan program studi harus terakreditasi minimal A. (Kompas.com/Nursita Sari, 2019)

Bantuan pembiayaan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.113 tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan untuk mahasiswa dari perekonomian menengah kebawah dengan mengeluarkan program bantuan sosial mutu pendidikan KJMU. Seluruh pendanaan KJMU dibiayai oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Jakarta. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mencakup pembiayaan untuk berbagai keperluan, diantaranya pembayaran uang kuliah, alat tulis, buku, transportasi, bahan pokok, serta biaya lainnya yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk menunjang pendidikan. (Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2016)

Program ini mulai didistribusikan pada tahun 2016 dengan persyaratan-persyaratan yang terbilang masih mudah, salah satu persyaratannya adalah nilai indeks prestasi (IP) dari setiap semester yang telah di tempuh. Hal tersebut menjadi didasarkan untuk upaya kematangan mahasiswa dalam bidang akademik. Kemudian dalam Peraturan Gubernur No. 97 Tahun 2019 pasal 31, dalam upaya melaksanakan salah satu tri dharma perguruan tinggi, pemerintah provinsi DKI Jakarta memberikan kebijakan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan wajib pengabdian kepada masyarakat di luar program wajib perguruan tinggi yang dapat berupa pelayanan langsung kepada masyarakat, bakti sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilaksanakan saat mahasiswa libur sebanyak minimal satu kali dalam setahun. Hal ini didasarkan pada konstruksi program KJMU yang sudah berjalan selama tiga tahun mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2019 yang berdasarkan data perkembangan

penerima KJMU yang meningkat setiap tahunnya dianggap berhasil memberikan akses kepada mahasiswa dari kalangan menengah kebawah untuk bisa mencapai pendidikan tinggi.

Penetapan kebijakan ini merupakan salah satu langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merekonstruksi program yang mereka buat untuk memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran sosial mahasiswa penerima KJMU. (Kusumajati & Kurniawan, 2019) Pemerintah Provinsi berharap kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat meningkatkan kepedulian dan kesadaran sosial para mahasiswa terhadap masyarakat, hal ini juga menjadi pendorong mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan sosial sehingga membuka sifat sosialisasi dari para mahasiswa penerima KJMU. (Yuliawati, 2012) Kewajiban pengabdian masyarakat oleh penerima KJMU juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap masyarakat serta meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan komunikasi para mahasiswa.

Mahasiswa penerima KJMU pada awalnya hanya diperuntukkan kepada mahasiswa kurang mampu dari PTN, namun pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan bahwa mahasiswa dari PTS yang berlokasi eksklusif hanya di wilayah DKI Jakarta dengan akreditasi kampus dan program studi harus terakreditasi A atau unggul juga dapat mengajukan program KJMU. (Kilas24.com/Lowa Andi) Hal ini didasarkan bahwa tidak semua mahasiswa yang masih ingin melanjutkan perkuliahan dengan perekonomian rendah dapat lolos ke PTN, karenanya kebijakan tersebut diubah. Tercatat 13 PTS di Jakarta yang sudah bisa mengajukan program KJMU, salah satunya adalah Universitas Nasional. Pemilihan lokus Universitas Nasional didasarkan karena Universitas Nasional merupakan salah satu PTS di Jakarta yang sudah bekerja sama dengan KJMU dan menjadi peringkat ketiga dengan jumlah mahasiswa PTS penerima KJMU terbanyak di Jakarta. Kegiatan wajib pengabdian masyarakat melalui program KJMU di Universitas Nasional diharapkan dapat memberikan pengalaman mengabdikan kepada masyarakat oleh mahasiswa penerima KJMU serta menjalankan tri dharma perguruan tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Rekonstruksi Nilai Kesadaran Sosial Melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat Dalam Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul”**, dan dalam penelitian ini menerapkan studi kasus pada mahasiswa Universitas Nasional penerima KJMU.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas menimbulkan pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi nilai sosial mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul sebelum adanya kebijakan wajib pengabdian masyarakat?
2. Bagaimana rekonstruksi kegiatan wajib pengabdian masyarakat dapat mengintervensi kesadaran sosial mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di Universitas Nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji konstruksi nilai sosial mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul sebelum adanya kebijakan wajib pengabdian masyarakat.
2. Untuk mengidentifikasi rekonstruksi kegiatan wajib pengabdian masyarakat dapat mengintervensi kesadaran sosial mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di Universitas Nasional.

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memberikan sejumlah informasi yang berguna bagi peneliti dan juga pembaca, oleh karena itu manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mendeskripsikan lebih mendalam terkait rekonstruksi program KJMU serta kesadaran sosial mahasiswa Universitas Nasional Jakarta penerima KJMU dengan adanya kewajiban pengabdian masyarakat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi peneliti:

Agar peneliti dapat membagikan pengalaman dan pola pemikirannya melalui penulisan skripsi sehingga dapat menganalisa, memproses, mengolah, dan mengasah wawasan, pengetahuan dan pengalaman.

Bagi pembaca:

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi panduan atau kontribusi berharga untuk suatu pengembangan ilmu yang diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini juga diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa calon penerima/penerima manfaat KJMU di Universitas Nasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran, serta memudahkan pembahasan maka dalam penulisan proposal skripsi ini dikelompokkan dalam III Bab dengan sistematika penulisan yang terdiri dari:

1. Bagian awal

Pada bagian awal proposal penelitian, memuat halaman sampul, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian inti

Pada bagian inti skripsi penelitian terdapat lima bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan, peneliti menjelaskan tentang data tingkat pendidikan dan salah satu program yang dapat memberikan bantuan kepada mahasiswa yang memiliki kemauan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dengan berdomisili di Jakarta, terdapat program bantuan bernama Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dalam perkembangan program tersebut yang telah diciptakan mulai dari tahun 2016 mengalami rekonstruksi dalam programnya, yaitu kewajiban untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran sosial mahasiswa penerima KJMU, salah satu PTS di Jakarta yang telah memenuhi persyaratan adalah Universitas Nasional, sehingga topik penelitian ini berjudul “Rekonstruksi Nilai Kesadaran Sosial Melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat Dalam Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Nasional Penerima KJMU)”, selanjutnya rumusan, tujuan, serta manfaat penelitian disusun dengan sistematis dan relevan dengan ilmu pengetahuan dan kegunaan yang praktis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, bagian awal peneliti menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian. selanjutnya berisi tentang konsep-konsep yang sesuai dengan penelitian, yaitu program bantuan pendidikan tinggi, pengabdian masyarakat, kesadaran sosial, dan konstruksi sosial, sedangkan teori yang berupa definisi dan pengertian yang berasal dari kutipan buku dan jurnal yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini menggunakan teori rekonstruksi sosial Michael Burawoy.

Dan terakhir adalah bagian kerangka pemikiran yang merupakan sebuah bagan yang digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa masalah yang diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini, yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif, penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, selanjutnya pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya teknik pengolahan data serta analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi, dan triangulasi data. Penelitian dilakukan di Universitas Nasional, Jl. Sawo Manila, Jakarta Selatan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran terkait hasil penelitian di lapangan mengenai hasil penelitian yang sudah peneliti dapatkan di lapangan. Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat menjelaskan kegiatan pengabdian masyarakat melalui program KJMU yang merupakan sesuai dengan teori rekonstruksi sosial Michael Burawoy tentang rekonstruksi sosial dengan konsep *new social movement*, meneliti bagaimana kesadaran sosial mahasiswa penerima KJMU dapat terbentuk melalui program ini, serta dalam upaya menjalankan tri dharma perguruan tinggi untuk ilmu pengetahuan oleh mahasiswa Universitas Nasional penerima KJMU.

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian di lapangan dari yang menjawab rumusan masalah untuk mengambil kesimpulan dan memberikan saran dari hasil penelitian tersebut.